

Peran BPJS Ketenagakerjaan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Desa Gumeng

**Cynthia Permata Sari¹, Gumilang Chandra Shasmita Haningati², Adalia Safira Rahma³,
Anggit Maynurrohmah⁴, Damar Aji Kuncoroyakti⁵, Kezia Mutiara Gavena⁶, Lucian
Tanjaya⁷, Muhammad Ilham Fadli⁸, Muhammad Rafi Arkan⁹, Ovi Dewi Oktavia¹⁰, Rexxy
Suryokusumo¹¹, Sirat Pramono¹², Talitha Dzakiyah Azzahra¹³**

^{2,3,4,5,6,9,10,11,13} Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Indonesia

⁷ Fakultas Kedokteran, Universitas Sebelas Maret, Indonesia

⁸ Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Sebelas Maret, Indonesia

¹² Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret, Indonesia

Corresponding Author

Nama Penulis: Gumilang Chandra Shasmita Haningati

E-mail: gumilangcsh@student.uns.ac.id

Abstrak

Petani memegang peran penting dalam perekonomian Indonesia, namun seringkali menghadapi berbagai tantangan, termasuk risiko kecelakaan kerja dan kurangnya jaminan untuk masa tua. Artikel ini membahas peran BPJS Ketenagakerjaan dalam meningkatkan kesejahteraan petani melalui program jaminan sosial, seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT). Melalui program ini, BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan finansial bagi petani, baik terkait kecelakaan saat bekerja maupun tabungan untuk masa pensiun. Kegiatan ini menggunakan metode sosialisasi serta pendampingan yang dilakukan oleh KKN UNS Kelompok 86 di Desa Gumeng, melibatkan 5 perwakilan dari 8 kelompok tani Desa Gumeng. Selain itu, pendampingan pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan juga dilakukan secara langsung. Hasil penelitian mengidentifikasi beberapa kendala, seperti kurangnya pemahaman, keterbatasan akses, dan ketidakpastian penghasilan petani. Studi kasus di Desa Gumeng menunjukkan bahwa kolaborasi antara BPJS Ketenagakerjaan dan KKN UNS mampu meningkatkan kesadaran petani terkait manfaat program ini.

Kata Kunci - *Perlindungan, Ketenagakerjaan, Jaminan, Petani, Perekonomian*

Abstract

Farmers play an important role in Indonesia's economy, but often face various challenges, including the risk of work accidents and lack of security for old age. This article discusses the role of BPJS Ketenagakerjaan in improving the welfare of farmers through social security programs, such as Work Accident Insurance (JKK), Death Insurance (JKM), and Old Age Insurance (JHT). Through this program, BPJS Employment provides financial protection for farmers, both related to accidents at work and savings for retirement. This activity uses socialization and mentoring methods carried out by KKN UNS Group 86 in Gumeng Village, involving 5 representatives from 8 farmer groups in Gumeng Village. In addition, assistance with BPJS Employment registration was also carried out directly. The results of the study identified several obstacles, such as lack of understanding, limited access, and uncertainty of farmers' income. The case study in Gumeng Village showed that the collaboration between BPJS Ketenagakerjaan and KKN UNS was able to increase farmers' awareness of the benefits of this program.

Keywords - *Protection, Employment, Insurance, Farmer, Economy*

PENDAHULUAN

Petani merupakan poros perekonomian bangsa yang hidupnya harus senantiasa disejahterakan agar menuai keberlanjutan dalam bidang pangan yang nantinya juga akan berdampak pada majunya sistem ekonomi bangsa. Sejatinya petani adalah pahlawan bangsa yang seringkali perhatiannya dikesampingkan publik. Padahal urgensi petani dalam bangsa ini cukup besar dalam menyokong perekonomian negara. Ironisnya, di era sekarang ini, banyak permasalahan serta tantangan yang dihadapi oleh petani dalam menjalankan pekerjaannya. Petani bukanlah sebuah profesi yang mudah untuk dijalankan, banyak hal yang harus dihadapi dan diselesaikan oleh petani.

Permasalahan yang kerap dialami oleh petani adalah, dalam hal kecelakaan kerja. Petani dengan gaya bekerja terjun di sawah atau ladang dengan mencaking sebuah lempeng baja tipis dengan tangkai panjang yang digunakannya untuk mencangkul acap kali menjadi risiko untuk sang petani dalam menjalani pekerjaannya. Selain itu, permasalahan lainnya yang sering dialami oleh petani adalah mempersiapkan alokasi dana untuk masa pensiun. Petani yang diketahui bersama bahwa dalam menjalani pekerjaannya perlu tenaga ekstra. Namun, tidak selamanya seorang petani memiliki tenaga yang cukup untuk bekerja sebagai petani. Tidak selamanya petani berusia muda, seiring bertambahnya usia, tingkat produktivitas petani akan menurun yang disebabkan oleh bertambahnya usia. Oleh sebab itu, diperlukannya alokasi dana masa pensiun agar di masa yang sudah tidak produktif petani tetap hidup dengan sejahtera.

Berangkat dari masalah tersebut, KKN UNS Kelompok 86 membawa gelombang semangat untuk para petani di Desa Gumeng agar dapat menghadapi tantangan-tantangan di atas. Bersama BPJS Ketenagakerjaan, KKN UNS Kelompok 86 berkolaborasi untuk meramu obat dalam menyembuhkan permasalahan-permasalahan petani di Desa Gumeng dengan memberikan solusi konkrit agar petani di Desa Gumeng tidak cemas terkait keselamatan kerja hingga jaminan hari tua. Dengan demikian, isu-isu keselamatan kerja hingga jaminan hari tua untuk para petani di Desa Gumeng dapat teratasi dengan baik dan terealisasi berkat rangkulan BPJS Ketenagakerjaan dan koordinasi baik KKN UNS Kelompok 86.

METODE

Metode yang digunakan dalam pendampingan dan penyuluhan BPJS Ketenagakerjaan kepada kelompok tani Desa Gumeng, meliputi beberapa tahapan, sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan, pada tahap ini Tim KKN UNS Kelompok 86 mencari informasi melalui perangkat Desa Gumeng tentang keadaan petani di Desa Gumeng, setelah itu dengan perangkat Desa Gumeng menganjurkan untuk menghubungi ketua Gapoktan Desa Gumeng. Kemudian TIM KKN 86 dan ketua Gapoktan membuat kesepakatan agenda kegiatan dan waktu untuk pendampingan dan penyuluhan dari BPJS Ketenagakerjaan.
2. Tahap pelaksanaan kegiatan dilakukan secara terstruktur mengacu pada jadwal acara yang telah dibuat sebelumnya, yaitu acara dimulai dengan pembukaan, sambutan dari Kepala Desa Gumeng, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar, sambutan dari Ketua Pelaksana, lalu sambutan dari DPL (Dosen Pembimbing Lapangan) KKN UNS 86, dan kemudian dilanjutkan penyuluhan program asuransi dengan metode sosialisasi dan diskusi tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan BPJS Ketenagakerjaan, serta program-programnya atau manfaatnya. Kegiatan ini dihadiri masing masing 5 perwakilan dari 8 Kelompok Tani. Setelah kegiatan ini Kelompok KKN 86 bertugas untuk melakukan pendampingan pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan.

Kegiatan ini menggunakan metode penyuluhan hukum yaitu menyuluh atau memberikan penjelasan tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada peserta yang hadir, kemudian ditindaklanjuti dengan pendampingan terhadap peserta yang berkeinginan menjadi peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Edy Nurcahyo dkk, 2020: 118)

HASIL DAN PEMBAHASAN

I. Peran BPJS Ketenagakerjaan Menjamin Kesejahteraan Petani

Di dalam Pasal 28 H ayat (3) UUD 1945, menekankan bahwa “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional). Dasar hukum tentang hak atas pekerjaan dan hak atas jaminan sosial bagi setiap warga Negara, secara eksplisit sudah diatur sebagai berikut: Berdasarkan Pasal 1 angka 31 Undang-Undang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa kesejahteraan pekerja/buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan/atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat. Menurut Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan “Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja”. Dalam ketentuan tersebut jaminan sosial tenaga kerja merupakan suatu hak yang tidak hanya dimiliki oleh pekerja/buruh tetapi juga keluarga. Pemberian hak kepada pekerja ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan pelayanan bila ada anggota keluarga pekerja mengalami sakit atau memerlukan bantuan medis lain seperti hamil dan melahirkan serta mereka yang mendapatkan kecelakaan kerja. (Maimun, 2004).

Kesejahteraan yang perlu dikembangkan bukan hanya bagi tenaga kerja itu sendiri, melainkan juga bagi keluarganya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam arti luas, yang harus tetap dipelihara termasuk pada saat pekerja kehilangan sebagian atau seluruh penghasilannya sebagai akibat terjadinya risiko ekonomi dan risiko sosial antara lain kecelakaan kerja, sakit, meninggal dunia, cacat akibat kecelakaan kerja dan hari tua. Dalam keadaan hilang sama sekali, kehilangan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi dirinya dan keluarganya. Oleh karena risiko ini bersifat universal, maka perlu dipecahkan secara sistematis, terencana, bertahap dan berkelanjutan (Siti Ummu Adillah, 2020).

BPJS Ketenagakerjaan memiliki peran penting dalam menjamin kesejahteraan petani melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan. Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, BPJS Ketenagakerjaan didirikan sebagai transformasi dari PT. Jamsostek (Persero) pada 1 Januari 2014 (Catur, 2022). Petani diwajibkan menjadi peserta aktif Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, termasuk Penyuluh Pertanian dan Pendamping Program Pertanian, untuk memperoleh perlindungan sosial dan ekonomi.

Program BPJS Ketenagakerjaan memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi petani, seperti perlindungan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan tabungan untuk Jaminan Hari Tua. Ini diharapkan dapat membantu memenuhi jaminan sosial dan kesejahteraan petani (Nur Aprillia, 2023). Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan melakukan sosialisasi dan peningkatan kesadaran di kalangan petani tentang pentingnya memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan, bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan kepesertaan petani.

BPJS Ketenagakerjaan berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan petani di Indonesia dengan menyediakan berbagai program jaminan sosial. Melalui Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), petani terlindungi dari risiko kecelakaan yang terjadi saat bekerja di ladang, dengan adanya perlindungan biaya pengobatan serta santunan jika mengalami cacat atau kematian. Jaminan Kematian (JKM) juga memberikan dukungan finansial kepada keluarga petani yang meninggal dunia, sementara Jaminan Hari Tua (JHT) membantu petani mempersiapkan tabungan untuk masa pensiun atau masa sulit lainnya. Untuk mencapai tujuan ini, BPJS Ketenagakerjaan melakukan sosialisasi dan kampanye agar petani memahami manfaat dan prosedur pendaftaran, serta bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memperbaiki akses dan infrastruktur pendaftaran di daerah pedesaan. Program-program

khusus dan penyesuaian iuran juga diterapkan untuk meringankan beban petani dalam mengikuti program jaminan sosial. Meskipun tantangan dalam pendaftaran dan kepesertaan masih ada, upaya berkelanjutan diperlukan untuk memastikan lebih banyak petani mendapatkan perlindungan dan dukungan yang mereka butuhkan.

BPJS Ketenagakerjaan juga berkoordinasi dengan pemerintah dan kepolisian untuk menegakkan kepatuhan atas regulasi yang berlaku terkait perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, sehingga petani dapat lebih aman dan terlindungi. Dengan demikian, BPJS Ketenagakerjaan memainkan peran penting dalam menjamin kesejahteraan petani melalui program jaminan sosial yang komprehensif dan terkoordinasi dengan pemerintah

II. Kendala yang Dialami BPJS Ketenagakerjaan dalam Melaksanakan Program Jaminan Kesejahteraan Petani

Adanya program jaminan kesejahteraan bagi petani oleh BPJS Ketenagakerjaan mempunyai peran yang strategis guna meningkatkan perlindungan sosial dan ekonomi bagi masyarakat desa yang agraris. Akan tetapi, di dalam praktiknya masih ditemui banyak kendala yang dihadapi oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan yang diakibatkan oleh beberapa faktor. Kendala yang utama yang dihadapi adalah kurangnya sosialisasi dan kesadaran masyarakat di desa dimana mayoritas petani yang tinggal di desa belum memahami secara penuh mengenai manfaat yang ditawarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan yang juga dapat menjadi jaminan sosial bagi petani di desa. Masih minimnya sosialisasi yang diterima petani di Desa Gumeng menjadi salah satu penyebab yang dapat menghambat pelaksanaan program. Informasi yang didapatkan oleh petani di Desa Gumeng masih sering disalah pahami, sehingga mereka masih ragu untuk bergabung dengan tawaran yang diberikan oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan. Dengan adanya program kerja yang dilaksanakan oleh KKN UNS Kelompok 86 Desa Gumeng bekerjasama dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Sragen yang dilaksanakan pada hari Rabu, 24 Juli 2024 bertempat di Gedung Pertemuan Desa Gumeng diharapkan dapat membawa perubahan melalui “Edukasi dan Pendampingan terkait Keselamatan Kerja dan Jaminan Hari Tua Petani Desa Gumeng melalui Kegiatan Kuliah Kerja Nyata”.



Gambar 1.
Sosialisasi oleh BPJS Ketenagakerjaan

Kendala yang kedua adalah berkaitan dengan keterbatasan akses ke layanan BPJS Ketenagakerjaan, mengingat letak geografis Desa Gumeng yang jauh dari kantor pelayanan BPJS Ketenagakerjaan yang letaknya berada di pusat Kabupaten Karanganyar. Jarak yang jauh yang dapat menguras waktu menjadi pertimbangan petani di Desa Gumeng. Oleh karena itu adanya program kerja yang dilaksanakan oleh Kelompok 86 KKN UNS Tahun 2024 diharapkan dapat menjadi jembatan bagi petani di Desa Gumeng dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan.

Yang ketiga adalah petani di Desa Gumeng terkendala karena ketidakpastian penghasilan dan keterbatasan perekonomian petani. Mayoritas petani di Desa Gumeng memiliki penghasilan yang tidak tetap bergantung pada hasil panen dan musim. Hal tersebutlah yang menjadi kendala tambahan dimana petani bisa saja mengalami kesulitan dalam membayar iuran BPJS secara rutin.

Kendala yang terakhir diakibatkan oleh rendahnya kepedulian serta keikutsertaan masyarakat di Desa Gumeng. Adanya program jaminan kesejahteraan masih sering diabaikan oleh petani karena adanya rasa kurang percaya terhadap pemerintah dan ketergantungan pada subsidi pemerintah yang implementasinya belum secara efektif menjangkau seluruh petani di wilayah Indonesia. Dengan adanya program kerja yang telah dilaksanakan dengan menggandeng tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Desa Gumeng diharapkan dapat memberikan perubahan positif bagi para petani mengenai kesadaran akan pentingnya keselamatan kerja dan jaminan hari tua yang ditawarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

KESIMPULAN

BPJS Ketenagakerjaan berperan krusial dalam meningkatkan kesejahteraan petani di Indonesia dengan menyediakan program jaminan sosial seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT). Program ini memberikan perlindungan terhadap risiko kecelakaan, dukungan finansial kepada keluarga yang ditinggalkan, dan tabungan untuk masa pensiun. Untuk memastikan manfaat ini diterima secara maksimal oleh petani, BPJS Ketenagakerjaan melakukan sosialisasi, kampanye, dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk memperbaiki akses dan infrastruktur pendaftaran, serta menerapkan program-program khusus yang meringankan beban petani.

Namun, terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaan program ini. Kurangnya sosialisasi dan pemahaman di kalangan petani, keterbatasan akses ke layanan BPJS, ketidakpastian penghasilan, dan rendahnya kepedulian masyarakat menjadi hambatan utama. Inisiatif seperti program edukasi dan pendampingan yang dilakukan oleh KKN UNS di Desa Gumeng diharapkan dapat mengatasi kendala-kendala ini, meningkatkan kesadaran, dan memperbaiki akses serta partisipasi petani dalam program jaminan sosial. Upaya berkelanjutan diperlukan untuk memastikan bahwa lebih banyak petani mendapatkan perlindungan dan dukungan yang mereka butuhkan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya, artikel dengan judul "Peran BPJS Ketenagakerjaan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Desa Gumeng" ini dapat diselesaikan tanpa ada suatu halangan berarti.

Kami ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **BPJS Ketenagakerjaan**, yang telah memberikan dukungan dan informasi berharga mengenai program-programnya dalam meningkatkan kesejahteraan petani.
2. **Pemerintah Desa Gumeng**, yang telah memberikan kesempatan dan bantuan dalam pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan ini.
3. **Para petani Desa Gumeng**, yang telah bersedia berbagi pengalaman dan pandangan mereka, sehingga memberikan gambaran nyata mengenai manfaat dari program BPJS Ketenagakerjaan.
4. **Dosen pembimbing** dan seluruh pihak akademis yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat berguna baik selama pelaksanaan KKN hingga penulisan artikel ini.
5. **Rekan-rekan tim KKN**, yang telah bekerja sama dengan penuh dedikasi selama program berlangsung, sehingga program ini dapat terlaksana dengan baik.

Semoga artikel ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak dan dapat menjadi salah satu referensi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani di masa yang akan datang. Kami menyadari bahwa artikel ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kami sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Hidayat, (2017), Pengertian BPJS Ketenagakerjaan: Program dan Manfaatnya, <https://www.intanblog.com/pengertian-bpjs-ketenagakerjaan/>.
- Aprillia, N., & Lubis, F. A. (2023). Analisis BPJS Ketenagakerjaan Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja Khususnya Petani Di Bangun Purba. *Jurnal Mirai Management*, 8(2), 326-333.
- Catur, F. W. (2022). *Studi Pelaksanaan Program BPJS Ketenagakerjaan Untuk Petani di Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat* (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
- Edy Nurcahyo, dkk., (2020), Penyuluhan Hukum Tentang Bahaya Narkoba Di SMA Negeri 4 Pasarwajo Kabupaten Buton, Empowerment: *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, e-ISSN 2598-2052, Vol. 03 Nomor 02.2020.
- Indriyanti, H. (2020). *Tinjauan Atas Klaim Jaminan Hari Tua (JHT) Pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bogor Kota* (Doctoral dissertation, Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan).
- Lifepal, (2020), BPJS Ketenagakerjaan: Program, Peserta, dan Cara Cek Saldo [Terbaru], https://lifepal.co.id/media/program-bpjs-ketenagakerjaan/#Siapa_saja_yang_menjadi_peserta_BPJS_Ketenagakerjaan
- Listyorini, T. (2016). Pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Informal di Bidang Peternakan dan Pertanian Di Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman.
- Maimun, (2004), Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Pristanti, S. N., Sukidin, S., & Hartanto, W. (2022). Implementasi Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Pada Pekerja Informal (Studi Kasus Di Desa Dukuhdempok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember). *Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi dan Ilmu Sosial*, 16(2), 297-308.
- Putri, P. D. S., & Lasmi, N. W. (2024). Optimalisasi Jaminan Sosial bagi Pekerja Informal: Studi Pengabdian di Kabupaten Bangli. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*, 5(3), 3632-3639.